PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JUMARTHI ACHMAD**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **462772**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 2.565.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 479 m2/101 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/138 m2 di KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/36 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 20000 m2 di WAJO, WARISAN Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/120 m2 di BONE, WARISAN Rp. 450.000.000
6. Tanah Seluas 50000 m2 di WAJO, WARISAN Rp. 125.000.000
7. Tanah Seluas 20000 m2 di LUWU TIMUR, LAINNYA Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 10000 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
9. Tanah Seluas 800 m2 di BONE, WARISAN Rp. 100.000.000
10. Tanah Seluas 220 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 248.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINI BUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, NISSAN MARCH 1.2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. 177.000.000

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	402.773.573
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	3.392.773.573
III.	HUTANG	Rp.	----
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.392.773.573

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.